



CSR Swasta Disoal

Rawan Konflik Kepentingan

NORMALISASI waduk di Jakarta hendaknya dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemprov DKI. Sehingga tidak melibatkan penggunaan anggaran dari swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). Dikawatirkan justru rawan konflik kepentingan. Seperti normalisasi Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara (Jakut).

Di lokasi tersebut, terdapat perusahaan yang ikut menyumbangkan dana CSR. "Menurut hemat kami itu rawan menjadi konflik kepentingan. Kami khawatir nantinya sumbangan CSR itu bisa dimanfaatkan. Seperti adanya kemudahan izin dan sebagainya," ujar Ketua Umum Masyarakat Peduli Air Safrudin kepada INDOPOS, kemarin (8/1).

Keberadaan dana CSR, serta dinas yang ikut menangani waduk, sambung Safrudin, bisa membuat sulit diketahui siapa yang bertanggungjawab. Selain itu,

adanya dana CSR juga tidak bisa dipastikan kelanjutan normalisasi. Apakah perusahaan tersebut bersedia setiap tahun mengeluarkan uang, yakni untuk proyek tersebut.

Karena itu, mantan aktivis Walhi DKI itu menyarankan, normalisasi seluruh waduk di DKI dikerjakan sepenuhnya menggunakan anggaran Pemprov DKI Jakarta. "Jadi sistemnya nanti ditenderkan saja. Biar swasta yang masuk nantinya. Itu juga lebih mudah pengawasan dan pertanggungjawabannya. Dibandingkan seperti yang di Waduk Pluit misalnya," tandas dia.

Safrudin juga mengatakan, setelah itu pemeliharaan waduk secara berkesinambungan bisa melibatkan masyarakat sekitar. Sehingga warga merasa memiliki. "Dinas PU juga ikut dalam hal pemeliharaan waduk. Jadi proyek tersebut terus berkesinambungan," tambah dia.

Mengomentari hal itu, Ketua Jakarta Budget Watch (JBW) Syahrir Andika mengatakan, normalisasi Waduk Pluit bahwa pelaksanaannya oleh Pemprov DKI.

Sejumlah instansi terlibat, seperti Dinas Pertamanan dan Dinas PU. "Selain itu, ada juga dana CSR dari perusahaan. Kami mengapresiasi perusahaan yang ikut menyumbangkan dana untuk perbaikan lingkungan," kata dia.

Namun agar tidak terjadi tumpang tindih proyek, kata Andyka, harus dibuat satu UPT yang kerjanya khusus mengurus waduk. "Kalau CSR itu kan digunakan sesuai proposal. Namun alangkah bagusnya juga dibuat satu UPT. Saya sudah berulang kali mengusulkan hal itu Jadi CSR untuk waduk bisa melalui UPT tersebut," imbuh dia.

Sementara itu, Ketua Komisi D (bidang pembangunan) DPRD DKI Jakarta M Sanusi mengatakan, pengelolaan waduk melalui UPT harus diusulkan terlebih dahulu. Yakni melalui Organisasi Tata Laksana (Ortala). "Harus ada usulan terlebih dahulu. Namun saat ini Pemprov DKI juga sudah melakukan normalisasi waduk. Disamping tentunya mengatasi jalan berlubang dan juga genangan," pungkask dia. (dai)

PENGUNAAN DANA CSR SWASTA

- Untuk pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir
 - Normalisasi waduk
 - Normalisasi aliran kali
 - Pembangunan rumah susun
 - Pemeliharaan ruas taman, dll

TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA CSR

- Jumlah penerimaan (tak jelas)
- Jumlah pengeluaran (tak jelas)
- Digunakan untuk apa saja (tak jelas)
- Dari perusahaan mana saja (tak jelas)
- Instansi penerima (tak jelas)
- Tumpang tindih dana CSR dan pemprov (tak jelas)



GIMBAL/INDOPOS